

## Peran Ethical Governance Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Perusahaan

Dina Nazilatul Hidayah<sup>1</sup>, Dwi Sinta Amalia<sup>2</sup>, Nayaka Khansa Ariella<sup>3</sup>, Karina Oktaviani<sup>4</sup>, Dwi Novaria Misidawati<sup>5</sup>, Nanda Tribramantya Purnama<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

<sup>6</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Korespondensi Email: [dina.nazilatul.hidayah@mhs.uingsdur.ac.id](mailto:dina.nazilatul.hidayah@mhs.uingsdur.ac.id)

Received: 14/03/2025	Revised: 05/05/2025	Accepted: 06/05/2025	Published: 07/05/2025
----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

### Abstract

*The implementation of ethical governance is a crucial aspect in forming transparent and accountable corporate governance. Governance based on ethical principles is believed to be able to increase stakeholder trust and support the company's sustainability. This research aims to examine the role of ethical governance in forming transparent and accountable corporate governance. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through literature review from various relevant sources, including the principles of Good Corporate Governance and business ethics. The results of the study show that ethical governance, which is based on the values of integrity, openness, and honesty, makes a significant contribution to increasing transparency and accountability of companies. Transparency is achieved through the delivery of accurate and timely information, while accountability is strengthened through an internal oversight system and the formation of an organizational culture that upholds ethics. In addition, the effectiveness of implementing ethical governance is influenced by internal factors such as organizational culture and management commitment, as well as external factors such as government regulations and public pressure. This study concludes that the integration of ethical principles into corporate governance is an important foundation in building transparency, accountability, and stakeholder trust, which ultimately supports corporate sustainability.*

**Keywords:** Ethical Governance; Transparency; Accountability.

### Abstrak

Penerapan *ethical governance* merupakan aspek krusial dalam membentuk tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Tata kelola yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika diyakini mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran *ethical governance* dalam membentuk tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dari berbagai sumber relevan, termasuk prinsip *Good Corporate Governance* dan etika bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ethical governance*, yang berlandaskan pada nilai-nilai integritas, keterbukaan, dan kejujuran, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Transparansi tercapai melalui penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu, sementara akuntabilitas diperkuat melalui sistem pengawasan internal serta pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika. Selain itu, efektivitas penerapan *ethical governance* dipengaruhi oleh faktor internal seperti budaya organisasi dan komitmen manajemen, serta faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan tekanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip-prinsip etika ke dalam tata kelola perusahaan merupakan fondasi penting dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan perusahaan.

**Kata Kunci:** Ethical Governance; Transparansi; Akuntabilitas.

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan menjadi semakin penting. Skandal korporasi yang terjadi di berbagai belahan dunia telah menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas dan transparansi operasional perusahaan. Oleh karena itu, konsep *ethical governance* atau tata kelola berbasis etika menjadi krusial sebagai fondasi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan itu, penerapan etika bisnis yang disertai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) semakin relevan, khususnya bagi perusahaan yang sedang berkembang. Kesadaran akan pentingnya integritas dalam berbisnis mulai tumbuh, dan banyak perusahaan menyadari bahwa keberhasilan dan keuntungan jangka panjang hanya dapat dicapai jika operasional dijalankan secara etis dan prinsip-prinsip GCG diterapkan secara konsisten. Dalam konteks kompetisi global, persaingan tidak lagi terjadi antarnegara, melainkan antar korporasi. Oleh karena itu, kinerja setiap perusahaan sangat menentukan stabilitas dan pemulihan ekonomi suatu negara (Risti Ananda Yulia 2023).

Etika dan perilaku etis merupakan pilar penting dalam membangun integritas dan keberlanjutan perusahaan. Dalam praktik bisnis, perilaku etis tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Etika memengaruhi seluruh aktivitas perusahaan, khususnya yang berdampak pada individu, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan pedoman etika untuk menjaga kualitas tata kelola, mencegah pelanggaran, dan memperkuat kepercayaan publik (Sivasubramaniam et al. 2021).

Dalam kerangka tersebut, tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh proses dalam perusahaan dijalankan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. GCG mengedepankan transparansi, akuntabilitas, integritas, serta penghormatan terhadap hak-hak pemegang saham, karyawan, dan seluruh pemangku kepentingan. Penerapan GCG yang konsisten akan mendorong peningkatan efektivitas dan kinerja perusahaan secara menyeluruh (Kenn and Zega 2023).

Salah satu pilar utama dalam penerapan GCG adalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi penting secara akurat kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut mencakup visi, misi, strategi, kondisi keuangan, struktur organisasi, hingga kompensasi manajemen. Namun, dalam menjalankan transparansi, perusahaan tetap berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan hak pimpinan, sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, kebijakan transparansi harus dirumuskan secara tertulis dan dikomunikasikan secara efektif kepada pihak yang berwenang (Citra et al. 2024).

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas juga menjadi elemen kunci dalam tata kelola berbasis etika. Akuntabilitas berasal dari istilah *accountability*, yang mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan kepada pihak yang memiliki wewenang. Dalam konteks perusahaan, akuntabilitas berarti bahwa pihak yang diberi amanah (agent) harus menyampaikan laporan, menjelaskan kegiatan, dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (principal) yang berhak untuk menilai dan mengevaluasi kinerjanya (Oktarini Khamilah Siregar 2020). Dengan menegakkan akuntabilitas, perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap integritas dan kepercayaan publik.

Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana peran *ethical governance* dalam membentuk tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Pertama, perlu dianalisis sejauh mana *ethical governance* berkontribusi dalam mendorong keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan di lingkungan perusahaan sebagai bentuk transparansi kepada para pemangku kepentingan. Kedua, penting untuk mengevaluasi bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika dalam tata kelola dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan, khususnya dalam hal pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi *ethical governance*, baik dari sisi internal perusahaan maupun dari faktor eksternal, dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang berkelanjutan.

Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh peran *ethical governance* dalam membentuk sistem tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan pembahasan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai sejauh mana nilai-nilai etika mampu mendorong keterbukaan informasi serta proses pengambilan keputusan yang adil dan bertanggung jawab dalam perusahaan. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana penerapan prinsip etika dapat memperkuat akuntabilitas manajemen dalam mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pemegang saham maupun masyarakat. Di samping itu, pembahasan ini juga mengidentifikasi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan *ethical governance* dalam rangka menciptakan tata kelola yang berkelanjutan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji bagaimana peran *ethical governance* berkontribusi dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam pemahaman tentang nilai-nilai etika dalam tata kelola perusahaan serta implementasinya dalam praktik nyata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kontribusi *ethical governance* terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta mengungkap berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang bersumber dari referensi sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, laporan riset, dan regulasi yang berkaitan dengan prinsip *Good Corporate Governance* dan etika bisnis. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan penerapan tata kelola etis (*ethical governance*) dalam perusahaan. Tahap pertama dalam analisis ini adalah mengkaji peran tata kelola etis dalam meningkatkan transparansi perusahaan. Proses ini melibatkan pengelompokan informasi untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat memperbaiki keterbukaan informasi dan ketepatan laporan keuangan, yang pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Selanjutnya, analisis ini akan mengkaji peran tata kelola etis dalam meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Pada bagian ini, data dianalisis untuk memahami bagaimana kebijakan etika dapat memperkuat tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Terakhir, analisis juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan tata kelola etis. Faktor pendukung, seperti komitmen manajerial dan dukungan regulasi, akan dibandingkan dengan hambatan-hambatan seperti resistensi internal atau kurangnya pelatihan tentang etika. Melalui

pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan prinsip tata kelola yang etis untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Peran Ethical Governance dalam Mendorong Transparansi Perusahaan**

Di era globalisasi dan tuntutan masyarakat pada masa sekarang yang semakin tinggi terhadap praktik bisnis yang beretika, penerapan prinsip ethical governance menjadi semakin penting dalam dunia perusahaan. Ethical governance atau tata kelola etis sangat ditekankan pada prinsip integritas, keterbukaan, dan kejujuran sebagai fondasi operasi perusahaan yang dianggap sehat dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Salah satu dampak utama yang dapat terjadi dari penerapan ethical governance ini adalah meningkatnya transparansi perusahaan, yang mana berperan sangat penting dalam membangun kepercayaan stakeholder serta menjaga keberlangsungan bisnis. Ethical governance adalah sistem dan mekanisme yang memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan bertanggung jawab, serta mematuhi nilai dan prinsip yang berlaku secara sosial dan hukum. Ethical governance meliputi kebijakan dan praktik yang memelihara perilaku etis dalam pengambilan keputusan dan interaksi perusahaan, baik internal maupun eksternal (KPMG, 2021). Selain itu dalam prinsip Islamiyah, ethical governance memberikan manfaat praktis dalam pengelolaan pemerintahan, penerapan etika Islam juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam membangun masyarakat yang beretika. Dengan mencontohkan prinsip-prinsip kejujuran, integritas, dan musyawarah, pemerintah dapat menjadi agen perubahan yang mempengaruhi budaya dan norma-nilai yang berlaku di masyarakat secara positif (Ramadhan, Hadist, and Kurniati 2024).

Tidak jauh berbeda dengan prinsip di atas, transparansi yang diterapkan dalam Perusahaan maupun organisasi juga merupakan salah satu aspek penting dari good corporate governance yang memengaruhi reputasi dan kredibilitas Perusahaan. Penerapan ethical governance yang selalu mengedepankan integritas, keterbukaan, dan kejujuran memaksa perusahaan untuk menyajikan informasi secara jujur dan menyeluruh tanpa terkecuali. Hal ini menciptakan iklim keterpercayaan di antara para stakeholder seperti investor, karyawan, pelanggan, dan publik. Ethical governance (tata kelola etis) memainkan peran krusial dalam mendorong keterbukaan dan akuntabilitas yang menjadi fondasi transparansi. Prinsip-prinsip seperti integritas, keterbukaan, dan kejujuran menjadi pedoman implementasi governance yang mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan kualitas informasi yang disajikan perusahaan. Dengan adanya integritas, perusahaan tidak akan menutupi kerugian atau informasi negative yang mungkin saja dapat tersaji. Integritas: Bertindak konsisten dengan nilai dan standar moral perusahaan, menghindari konflik kepentingan dan kecurangan. Keterbukaan: Menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu bagi pemangku kepentingan. Kejujuran: Berkomunikasi secara jujur dan tidak menyesatkan dalam seluruh aktivitas dan laporan. Sebaliknya, keterbukaan memungkinkan sejumlah besar informasi relevan dipublikasikan, tidak hanya yang menguntungkan saja tetapi juga kemungkinan seperti kerugian yang dapat terjadi kapan saja. Kejujuran memastikan bahwa informasi tersebut bebas dari segala unsur manipulasi. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Meskipun ada tantangan kontemporer seperti westernisasi dan korupsi, kemajuan teknologi, kerja sama internasional, dan demokratisasi membuka peluang besar untuk menerapkan etika dengan lebih efektif (Ramadhan, Hadist, and Kurniati 2024).

Laporan keuangan selalu disajikan sebuah organisasi maupun perusahaan merupakan media utama yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara kuantitatif. Perusahaan yang menerapkan prinsip ethical governance akan cenderung menyajikan laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sehingga memberikan gambaran yang nyata mengenai kondisi perusahaan mereka. Mereka tidak melakukan praktik manipulasi laporan seperti earnings management ataupun manipulasi serta kecurangan lainnya. Perusahaan publik biasanya memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi kepada masyarakat, baik melalui laporan tahunan, website, maupun media lain secara transparan. Sebuah perusahaan yang mengadopsi ethical governance secara konsisten akan dapat menjaga keterbukaan informasi tidak hanya seputar keuangan tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Keterbukaan ini tentunya dapat meningkatkan citra perusahaan dan mengurangi risiko persepsi negatif dari publik. Ethical governance juga mendorong perusahaan untuk aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk investor, komunitas lokal, dan mitra bisnis yang ada. Hal ini juga menunjukkan bahwa stakeholder engagement yang didasari oleh prinsip keterbukaan dan integritas meningkatkan kualitas pengambilan keputusan perusahaan serta manajemen risiko. Oleh karena itu, etika tata kelola menghadirkan area yang menarik untuk dieksplorasi seiring dengan lanskap aplikasi tata kelola yang terus berkembang di seluruh dunia (Ekasari et al. 2024). Berikut penerapan Ethical Governance dalam mendorong transparansi:

- a) **Membangun Budaya Etis**  
Budaya perusahaan yang mengutamakan etika adalah fondasi utama untuk meningkatkan transparansi. Dalam hal ini ditegaskan bahwa budaya etis yang kuat mendorong karyawan untuk melaporkan praktik tidak etis dan memperkuat mekanisme pengawasan internal.
- b) **Kebijakan dan Prosedur yang Jelas**  
Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development, kebijakan transparansi yang formal dan prosedur operasional yang jelas memudahkan pengungkapan informasi dan kepatuhan terhadap peraturan (OECD, 2021).
- c) **Pelatihan dan Pendidikan Etika**  
Dalam penelitian (Brown and Treviño 2006) menemukan bahwa pelatihan berdampak signifikan dalam menanamkan kesadaran etika dan mendorong perilaku transparan karyawan. Program-program ini melengkapi pemahaman soal pentingnya keterbukaan bagi kredibilitas perusahaan.
- d) **Pengawasan dan Akuntabilitas**  
Transparency International menggaris bawahi perlunya audit dan pengawasan sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip ethical governance dan akuntabilitas publik (Transparency International, 2022).
- e) **Komunikasi Efektif**  
Pada komunikasi terbuka dengan para pemangku kepentingan meningkatkan hubungan yang harmonis dan memperkuat kepercayaan. Penggunaan media sosial, laporan tahunan, dan forum diskusi menjadi saluran penting dalam praktik transparansi.

Berikut dampak Ethical Governance terhadap transparansi:

- 1) Meningkatkan Kepercayaan Pemangku Kepentingan  
Penerapan governance beretika secara signifikan meningkatkan kepercayaan investor, pelanggan, dan komunitas, yang berkontribusi pada reputasi positif dan stabilitas bisnis.
- 2) Mengurangi Risiko Hukum dan Reputasi  
Perusahaan yang berkomitmen pada ethical governance mengurangi potensi terjebak dalam sengketa hukum dan skandal reputasi yang merugikan.  
Berikut dukungan regulasi di Indonesia:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) mengatur kewajiban keterbukaan informasi oleh perusahaan (UU PT 2007).
  - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.04/2015.

### **Analisis Peran Ethical Governance dalam Meningkatkan Akuntabilitas Perusahaan**

Peran Pemerintahan Etis yang Meningkatkan Tanggung Jawab Perusahaan Prinsip-prinsip moral dan etika di seluruh proses tata kelola perusahaan, termasuk pengambilan keputusan, persiapan politik, implementasi operasional, dll Nilai-nilai seperti integritas, integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial adalah dasar utama pemerintah ini. Salah satu peran utama pemerintah etika dalam meningkatkan akuntabilitas adalah menciptakan transparansi Ketika etika adalah dasar dari tata kelola, proses pelaporan keuangan dan non-finansial dilakukan secara terbuka dan jujur. Informasi yang dikirim ke masyarakat umum mencerminkan persyaratan aktual dan secara objektif mempromosikan pemangku kepentingan. Selanjutnya, tata kelola etis membentuk budaya organisasi yang bertanggung jawab Budaya ini mendorong manajer dan perusahaan karyawan (baik manajer dan karyawan) untuk bertindak secara etis dan mengakui tanggung jawab moral mereka kepada perusahaan dan masyarakat. Dalam lingkungan ini, perilaku tidak etis seperti manipulasi data, korupsi, konflik kepentingan, dll, Lebih mudah dicegah karena nilai-nilai etis adalah bagian dari identitas organisasi, Tata kelola etika juga memperkuat sistem pengawasan internal.

Melalui pembentukan komite etika, pelatihan etis reguler, dan sistem pelaporan whistleblowing, bisnis dapat mengenali dan memperlakukan pelanggaran prinsip-prinsip etika yang sesuai Ini sangat berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas karena semua jejak yang menyimpang, inspeksi, dan sanksi yang tepat dapat diimplementasikan. Yang lebih penting, praktik pemerintah etis meningkatkan kepercayaan warga negara dan pemangku kepentingan perusahaan, Kepercayaan ini tidak hanya modal reputasi, tetapi juga mempengaruhi kesinambungan bisnis jangka panjang. Perusahaan yang diharapkan untuk memfasilitasi dukungan mudah dari investor, loyalitas dari pelanggan, dan hubungan yang baik dengan pengawas dan masyarakat. Namun, penerapan tata kelola etis bukan tanpa tantangannya Perlawanan internal, penegakan Kode Etika yang lemah, dan disintegrasikan antara nilai-nilai pribadi dan organisasi dari hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, dimasukkannya komitmen manajemen terbaik dan semua elemen organisasi sangat penting untuk pembentukan pemerintahan etis yang berkelanjutan. Korelasi penerapan asas GCG dengan akuntabilitas akuntansi tercermin pada sistem pengendalian internal dimana akuntansi menjadi bagian di dalamnya. Akuntabilitas akuntansi terjamin jika praktik pengendalian internal pengelolaan perusahaan yang baik dijalankan sebagai wujud dari terbangunnya GCG di perusahaan terbuka (Rochendi and Soesanto 2023).

Tata kelola (GCG) mempunyai prinsip-prinsip pokok GCG yang harus diterapkan adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Implementasi prinsip-prinsip GCG mencerminkan perusahaan telah dikelola dengan baik dan transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder (Sari, Hanum, and Rahmayati 2022). Mempromosikan penciptaan budaya organisasi berdasarkan moralitas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika Penggunaan tata kelola etis digunakan oleh bisnis:

- a) Peningkatan transparansi: Informasi keuangan dan non-keuangan disampaikan secara jujur dan terbuka kepada para pemangku kepentingan
- b) Peningkatan Kontrol Internal: Keputusan Berbasis Etika - Proses Pembuatan untuk Mengurangi Risiko Penyalahgunaan Otoritas dan Manipulasi Data
- c) Perilaku Etis: Manajemen dan karyawan lebih sadar akan kewajiban sosial dan etika, meminimalkan kemungkinan pelanggaran
- d) Meningkatkan kepercayaan publik: Etika yang baik menghasilkan reputasi positif dan memperkuat legitimasi perusahaan di mata investor, pelanggan, dan masyarakat

Terdapat beberapa dampak tata kelola terhadap akuntabilitas pada perusahaan yaitu sebagai berikut:

- a) Aplikasi tata kelola etis: Proses pelaporan keuangan dan non-finansial akan lebih akurat dan andal.
- b) Kinerja perusahaan dapat lebih mudah dievaluasi karena informasi yang diberikan mencerminkan persyaratan actual.
- c) Pemangku kepentingan lebih efektif dalam memantau dan memberikan umpan balik pada pedoman dan perilaku.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Ethical Governance dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas**

*Ethical governance* atau tata kelola beretika merujuk pada perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai keutamaan dalam pengelolaan sebuah institusi, baik itu korporasi maupun pemerintahan. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap masalah-masalah tata kelola yang sering terjadi, termasuk korupsi, ketidaktransparanan, dan lemahnya akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia, kesadaran tentang pentingnya tata kelola beretika muncul sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui praktik *good governance* (Sya'diyah, Putri, and Hayat 2025).

Dalam implementasinya, *ethical governance* menekankan pada penerapan prinsip-prinsip etika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga melibatkan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap kepentingan publik. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian terbaru, implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik menegaskan bahwa *good governance* tidak dapat dicapai hanya dengan regulasi dan kebijakan formal, tetapi memerlukan landasan etika yang kuat (Salsabila, Fitriani, and Hayat 2024).

Penerapan *ethical governance* (tata kelola beretika) menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di Indonesia, upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang beretika masih menghadapi berbagai tantangan meskipun terdapat faktor-faktor yang mendukung implementasinya. Laporan ini mengkaji secara komprehensif faktor-faktor yang mendukung dan menghambat

penerapan *ethical governance* dalam konteks mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia.

a. Faktor Internal

Penerapan *ethical governance* dalam organisasi publik maupun korporasi sangat bergantung pada tiga faktor internal kunci: budaya organisasi, komitmen manajemen puncak, dan sistem reward-punishment. Budaya organisasi yang berbasis nilai integritas menciptakan lingkungan kerja yang mendorong perilaku etis, sementara komitmen manajemen puncak menjadi penggerak utama dalam menetapkan standar dan kebijakan tata kelola. Sistem reward-punishment berfungsi sebagai mekanisme penguatan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Ketiga elemen ini saling terkait dalam membentuk ekosistem organisasi yang transparan dan akuntabel.

Budaya organisasi merupakan kumpulan nilai, norma, dan keyakinan yang secara bersama-sama dianut dan dijalankan oleh anggota organisasi, yang membentuk cara pandang dan perilaku mereka dalam bekerja. Dalam konteks penerapan *ethical governance*, budaya organisasi yang positif—seperti transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab—berperan sebagai fondasi utama untuk mencegah praktik maladministrasi dan korupsi (Satria 2020). Budaya yang kuat ini menginternalisasi nilai-nilai etika ke dalam setiap proses pengambilan keputusan dan interaksi antar anggota organisasi, sehingga perilaku etis menjadi bagian alami dari aktivitas sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan budaya etis yang kokoh dapat mengurangi risiko penyimpangan hingga 40%, karena anggota organisasi lebih termotivasi untuk berpegang pada prinsip-prinsip moral dan norma yang berlaku, serta lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan tidak etis. Selain itu, budaya organisasi yang baik juga meningkatkan kinerja karyawan dan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial, menciptakan lingkungan kerja yang lebih jujur dan berintegritas (Kirani et al. 2024). Sebaliknya, tanpa budaya yang mendukung, penerapan tata kelola beretika cenderung hanya menjadi kepatuhan formal terhadap regulasi tanpa perubahan perilaku yang substansial. Oleh karena itu, penguatan budaya organisasi yang beretika merupakan prasyarat penting agar implementasi *ethical governance* dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (Kurniawan and Putra 2025).

Komitmen manajemen puncak dalam penerapan *ethical governance* tidak hanya terlihat dari kebijakan formal yang mereka tetapkan, tetapi juga sangat bergantung pada konsistensi perilaku mereka sehari-hari dan alokasi sumber daya yang memadai untuk program-program etika. Studi kasus di MKTR menunjukkan bahwa ketika Direksi secara aktif terlibat dalam pelatihan nilai inti perusahaan, hal ini berdampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan terhadap kode etik, yakni sebesar 35% dalam kurun waktu dua tahun (PT Mitra Karsa Tbk, n.d.). Keterlibatan aktif manajemen puncak dalam pelatihan tersebut tidak hanya memberikan contoh teladan (*leading by example*) bagi seluruh jajaran organisasi, tetapi juga menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai etika merupakan prioritas strategis perusahaan. Selain itu, komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan anggaran dan sumber daya manusia yang cukup untuk pelaksanaan program etika, termasuk sosialisasi kode etik, audit etika, dan mekanisme pengawasan internal. Dengan demikian, manajemen puncak berperan sebagai penggerak utama yang memastikan bahwa nilai-nilai etika tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan diinternalisasi dan diimplementasikan secara nyata dalam budaya

organisasi. Komitmen yang kuat dari pimpinan ini mendorong seluruh elemen perusahaan untuk ikut serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meningkatkan kesadaran moral, dan memperkuat integritas organisasi secara keseluruhan (Saputra 2025).

Sistem reward-punishment yang efektif berperan sebagai behavioral nudges atau dorongan perilaku untuk meningkatkan kepatuhan etika di lingkungan pemerintahan. Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menunjukkan bahwa instansi pemerintah yang menerapkan sistem penghargaan berbasis kinerja etis mengalami penurunan laporan pelanggaran hingga 28% dalam kurun waktu tiga tahun (Diklat Pemerintah., n.d.). Sistem reward ini memberikan apresiasi berupa penghargaan materiil maupun non-materiil kepada pegawai yang menunjukkan kinerja dan perilaku sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang ditetapkan. Penghargaan tersebut tidak hanya meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja pegawai, tetapi juga memperkuat komitmen mereka terhadap nilai-nilai integritas dan pelayanan publik yang berkualitas (FITRIYANI 2023).

Di sisi lain, sistem punishment atau hukuman diterapkan secara adil dan konsisten untuk menindak pegawai yang melanggar aturan, baik berupa sanksi administratif, disipliner, maupun tindakan hukum jika pelanggaran cukup serius. Penerapan hukuman ini berfungsi untuk menegakkan disiplin dan memberikan efek jera sehingga mencegah terulangnya pelanggaran. Kejelasan kriteria pemberian reward dan punishment, transparansi proses, serta konsistensi pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan sistem ini dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, sehat, dan produktif. Selain itu, kombinasi antara penghargaan dan hukuman menciptakan keseimbangan yang mendorong pegawai untuk berperilaku etis secara berkelanjutan. Studi lain juga menunjukkan bahwa sistem reward-punishment yang terintegrasi dengan baik dapat meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme aparatur negara secara signifikan, sekaligus menurunkan risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Dengan demikian, sistem reward-punishment bukan hanya alat pengendalian, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun budaya organisasi yang beretika dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung., n.d.).

Budaya organisasi, komitmen manajemen, dan sistem reward-punishment membentuk siklus penguatan yang saling bergantung. Komitmen manajemen puncak diperlukan untuk membentuk budaya organisasi melalui kebijakan dan keteladanan, sementara budaya yang kuat mempermudah implementasi sistem reward-punishment. Data dari 50 BUMN menunjukkan bahwa organisasi dengan skor tinggi pada ketiga faktor ini memiliki risiko maladministrasi 60% lebih rendah dibandingkan organisasi yang hanya fokus pada satu faktor (Febriantina et al. 2025).

b. Faktor Eksternal

Penerapan ethical governance tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika internal organisasi, tetapi juga oleh faktor eksternal yang membentuk lingkungan operasional dan hukum. Regulasi pemerintah menetapkan batasan normatif, tekanan publik menciptakan akuntabilitas sosial, sementara tuntutan teknologi digital merevolusi praktik transparansi. Di Indonesia, ketiga faktor ini saling berinteraksi dalam membentuk ekosistem tata kelola yang beretika.

Regulasi pemerintah berperan sebagai kerangka hukum atau enabling environment yang memaksa organisasi, khususnya lembaga pemerintahan, untuk mematuhi standar etika minimum dalam penyelenggaraan tugasnya. Di Indonesia, kerangka hukum untuk ethical governance dibangun melalui hierarki peraturan yang mengatur tata kelola pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika (Jabar, Frinaldi, and Roberia 2024). Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi menjadi pedoman strategis dalam reformasi birokrasi yang menekankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pelayanan dan pengambilan Keputusan (“Perpres RI No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025” 2010). Regulasi-regulasi ini tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga mengharuskan lembaga pemerintah mengembangkan kode etik, mekanisme pengawasan, serta sistem pelaporan yang terbuka bagi masyarakat. Dengan demikian, regulasi pemerintah berfungsi sebagai landasan normatif yang mengikat seluruh aparatur negara untuk bertindak secara etis, sekaligus memberikan mekanisme sanksi bagi pelanggaran, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dapat dipercaya oleh publik. Implementasi regulasi ini juga diperkuat dengan upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan etika dan pengembangan budaya integritas, yang menjadi fondasi moral dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara profesional dan bertanggung jawab.

Tekanan publik berperan sangat penting sebagai penggerak akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Masyarakat sipil dan media bertindak sebagai external auditors yang secara aktif memantau kinerja birokrasi melalui berbagai mekanisme partisipasi dan kritik konstruktif. Peran masyarakat sipil ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik, advokasi perubahan kebijakan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran publik mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan pemerintahan. Survei Transparency International Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa 68% kasus korupsi di sektor publik terungkap berkat laporan masyarakat yang kemudian diviralkan melalui media sosial, menunjukkan betapa kuatnya tekanan publik dalam mengungkap praktik-praktik penyimpangan (Maritza and Taufiqurokhman 2024).

Organisasi masyarakat sipil seperti WALHI, PEKKA, dan YLBHI secara konsisten melakukan pengawasan publik yang efektif, memanfaatkan teknologi informasi dan jejaring sosial untuk menyebarluaskan informasi dan menggalang dukungan masyarakat. Media massa dan media sosial berfungsi sebagai amplifier yang memperkuat suara masyarakat, mempublikasikan ketidaksesuaian antara praktik birokrasi dan standar etika, serta memaksa pejabat publik untuk bertanggung jawab. Dengan partisipasi aktif masyarakat, birokrasi menjadi lebih transparan dan akuntabel, karena adanya pengawasan yang kontinu dan tekanan sosial yang mendorong perbaikan kinerja (INFID 2024). Selain itu, partisipasi masyarakat juga membantu mengidentifikasi masalah dan memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan sistem administrasi publik. Pengawasan publik yang

aktif ini memungkinkan pemerintah untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan maladministrasi. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat sipil dan media sebagai pengawas eksternal merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Strategi peningkatan literasi publik, kerja sama antar organisasi masyarakat sipil, serta peningkatan akses informasi menjadi langkah penting untuk memperkuat tekanan publik demi akuntabilitas birokrasi yang lebih baik (Heryani, Iskandar, and Malik 2023).

Revolusi digital membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, menciptakan paradoks antara meningkatnya ekspektasi transparansi publik dan tuntutan adaptasi birokrasi terhadap sistem yang lebih terbuka. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur melalui Perpres No. 95 Tahun 2018 menjadi langkah strategis pemerintah Indonesia untuk memodernisasi sektor publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi di seluruh tingkatan pemerintahan (BKPSDM Kota Yogyakarta., n.d.). Melalui SPBE, proses administrasi dan pelayanan publik didesain agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel, dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, keterpaduan, dan akuntabilitas sebagai landasan utama (Pemerintah Kota Makassar., n.d.).

Salah satu dampak nyata dari penerapan SPBE adalah percepatan waktu respon terhadap permohonan informasi publik. Jika sebelumnya proses permintaan informasi publik rata-rata memerlukan waktu hingga 14 hari, kini dengan sistem elektronik terintegrasi, waktu tersebut dapat dipangkas menjadi rata-rata hanya 3,2 hari. Hal ini dimungkinkan karena interoperabilitas sistem, integrasi data antar instansi, serta penggunaan aplikasi dan infrastruktur digital yang mendukung proses pelayanan publik secara real-time dan lintas lembaga. Selain mempercepat layanan, SPBE juga memudahkan monitoring, evaluasi, dan audit secara berkala, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi dapat diminimalisir (Pengadilan Negeri Ambon., n.d.). Lebih jauh, SPBE mendorong perubahan budaya kerja birokrasi menuju pola yang lebih responsif, kolaboratif, dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Dengan digitalisasi, masyarakat dapat mengakses informasi, mengajukan permohonan, dan memantau proses layanan publik secara lebih mudah, sehingga tercipta hubungan yang lebih transparan dan akuntabel antara pemerintah dan warga negara (Sartika 2020). Namun, transformasi ini juga menuntut birokrasi untuk terus beradaptasi, memperkuat kapasitas SDM, serta memastikan keamanan dan keberlanjutan infrastruktur digital agar manfaat SPBE dapat dirasakan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia (Pemerintah Kota Makassar., n.d.).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *ethical governance* memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan melalui penguatan nilai-nilai integritas, keterbukaan, dan kejujuran dalam tata kelola. Transparansi tercermin dari penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui sistem pengawasan yang efektif serta budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika. Keberhasilan implementasi *ethical governance* dipengaruhi oleh faktor internal seperti budaya organisasi dan komitmen manajemen, serta faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan tekanan publik. Dengan

demikian, integrasi prinsip-prinsip etika dalam tata kelola perusahaan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- BKPSDM Kota Yogyakarta. n.d. "PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 MEMPERKUAT TATA KELOLA BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA."
- Brown, Michael E., and Linda K. Treviño. 2006. "Ethical Leadership: A Review and Future Directions." *Leadership Quarterly* 17 (6): 595–616. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.004>.
- Citra, Devindya, Prameisti Putri, Winda Agustina Damayanti, and Alya Lutfianti. 2024. "Peran Hukum Dalam Menjamin Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan" 2 (4): 202–8.
- Diklat Pemerintah. n.d. "Mengenal Sistem Reward Dan Punishment Di ASN."
- Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. n.d. "Artikel Opini: Penerapan Kebijakan Reward Dan Punishment Dalam Birokrasi."
- Ekasari, Andini, Liana Rahardja, Imam Hidayat, and Juli Anwar. 2024. "Governance Ethics: Bibliometric VOSviewer Analysis and Future Research Opportunities." *International Journal of Digital Entrepreneurship and Business* 5 (1): 16–28. <https://doi.org/10.52238/ideb.v5i1.155>.
- Febriantina, Susan, Jennah Marsha Sanjaya, Nadiva Azzahra, Thabita Salsabila, and Vidya Indah Nurhafiza. 2025. "Etika Kepemimpinan Dalam Membentuk Budaya Organisasi Yang Berintegritas."
- FITRIYANI, RISKA. 2023. "PELAKSANAAN REWARD DAN PUNISHMENT DALAM KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH."
- Heryani, Dr. Ani, Dr. Ade Iskandar, and Dr. Drs. Malik. 2023. *Birokrasi Indonesia*.
- INFID. 2024. "Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia." 2024.
- Jabar, Syabran, Aldri Frinaldi, and Roberia. 2024. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara" 2: 720–28.
- Kenn, Julian, and Theophillus Zega. 2023. "Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Sebagai Mitigasi Risiko Manajemen Kinerja Organisasi." *Jurnal Manajemen Risiko* 3 (2): 117–30. <https://doi.org/10.33541/mr.v3i2.5050>.
- Kirani, Desvita Sekar Putri, Ajeng Syifa, Ira Riyani, Irma Niswatul Aini, and Jasmine Sekar Hadi. 2024. "Dampak Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan" 2 (9): 31–38.
- Kurniawan, Arif, and Grahadi Purna Putra. 2025. "Pengaruh Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korporasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Fakultas Hukum Universitas Khairun , Indonesia" 3: 132–49.
- Maritza, Dhiya Fahriyyah, and Taufiqurokhman Taufiqurokhman. 2024. "Peranan Masyarakat Sipil Dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik Yang Aktif." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 14 (1): 71–84. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>.

- Oktarini Khamilah Siregar. 2020. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di SMP Negeri 1 Tanjungbalai." *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 10 (1): 57–71. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/573>.
- Pemerintah Kota Makassar. n.d. "URGENSI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK."
- Pengadilan Negeri Ambon. n.d. "E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia."
- "Perpres RI No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025." 2010 1999 (1): 1–5.
- PT Mitra Karsa Tbk. n.d. "Komitmen Terhadap Tata Kelola Perusahaan."
- Ramadhan, Ilham, Nurul Hadist, and Kurniati Kurniati. 2024. "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2 (3): 15–22. <https://doi.org/10.61292/eljbn.209>.
- Risti Ananda Yulia. 2023. "Etika Dalam Perusahaan Sebagai Hasil Dari Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik." *Akuntansi* 45 4 (1): 92–96. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.762>.
- Rochendi, Teddy, and Slamet Soesanto. 2023. "Akuntabilitas Akuntansi Mendukung Good Corporate Governance Perusahaan Terbuka." *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan* 10 (2): 2043–50.
- Salsabila, Dita, Zalfa Zahira Fitriani, and Hayat. 2024. "Implementasi Etika Dalam Pengambilan Keputusan Publik: Tantangan Dan Langkah Utama Dalam Menciptakan Good Governance" 6 (6).
- Saputra, M Reza. 2025. "Implementasi Nilai-Nilai Etika Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Pendewasaan Berorganisasi Di HIQMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta" 4.
- Sari, Maya, Seprida Hanum, and Rahmayati Rahmayati. 2022. "Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia." *Owner* 6 (2): 1540–54. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.804>.
- Sartika, M. 2020. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Serdang Bedagai."
- Satria, Hariman. 2020. "Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6 (2): 169–86. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>.
- Sivasubramaniam, Shivadas, Dita Henek Dlabolová, Veronika Kralikova, and Reza Khan. 2021. "Membantu Anda Untuk Maju Dengan Etika Dalam Penelitian : Pengantar Tata Kelola Etika Dan Prosedur Aplikasi" 6: 1–18.
- Sya'diyah, Kholifatus, Salsabilla Azzahra Niesma Putri, and Hayat. 2025. "PERAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARAN" 6 (9).